

# **ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN TEGAL TIMUR, KOTA TEGAL**

Juning Diastuti, R. Slamet Santoso, Retna Hanani

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui besaran hubungan sumber daya dan kepatuhan kelompok sasaran dalam implementasi PKH. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara variabel sumber daya dan kepatuhan kelompok sasaran dengan implementasi PKH. Hal ini memiliki arti bahwa apabila sumber daya ditingkatkan maka akan menghasilkan implementasi PKH yang semakin meningkat. Sumber daya berkorelasi positif dengan implementasi PKH sebesar 38,2%. Kepatuhan kelompok sasaran berkorelasi positif dengan implementasi PKH sebesar 11,8%. Sumber daya dan kepatuhan kelompok sasaran secara bersama-sama memiliki korelasi yang signifikan dengan implementasi PKH sebesar 37,6% sementara sisanya 62,4% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sangat diperlukan penelitian lebih lanjut yaitu dengan menggunakan variabel komunikasi dan disposisi pelaksana program.

*kata kunci: sumber daya, kepatuhan kelompok sasaran, implementasi*

## **ABSTRACT**

*Program Keluarga Harapan (PKH) is a program of providing conditional social assistance to poor families (KM) who are designated as beneficiary families with purpose to improve the standard of living of Beneficiary Families (KPM) through access to education, health and social welfare services. In policy implementation, there are factors that determine the success of a policy implementation. The purpose of this research is to know magnitude the correlation between resources and the compliance of target groups in the implementation of Program Keluarga Harapan (PKH). The method used is a quantitative method with a questionnaire. The results showed that there was a positive and significant correlation between resource variables and target group compliance with PKH implementation. Resources have a positive correlation with PKH implementation of 38.2%. The compliance of the target group has a positive correlation with PKH implementation of 11.8%. Resources and target group compliance together have a significant correlation with PKH implementation of 37.6% while the remaining 62.4% is explained by other variables not in this research. Therefore, further research is needed by using variable communication and disposition of program implementers.*

*keyword: resource, target group compliance, implementation*

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah publik yang bersifat sangat kompleks dan multidimensi. Masalah kemiskinan menjadi perhatian publik karena berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan masih menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia. Kemiskinan ini dapat berimplikasi terhadap berbagai faktor, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, tingkat kemampuan ekonomi, pengangguran.

Upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan program yang mana sebagai sistem perlindungan sosial bagi rumah tangga sangat miskin dalam mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengembangkan sistem jaminan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat pada rumah tangga sangat miskin sebagai bentuk dari peningkatan

kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang kesehatan yang meliputi balita dan ibu hamil serta bidang pendidikan.

PKH mulai diberlakukan di Kota Tegal pada tahun 2015, dengan jangkauan 4 kecamatan di seluruh wilayah Kota Tegal. Pada tahun 2019, Kota Tegal berada di posisi ketiga diantara 6 kota di Jawa Tengah dengan total KPM sebanyak 6.257 dimana jumlah tersebut tersebar di 4 kecamatan yang memiliki 27 desa/kelurahan.

Kecamatan Tegal Timur merupakan wilayah yang memiliki KPM paling banyak diantara kecamatan yang lainnya yaitu sebesar 1.884 KPM pada tahun 2019. Dengan adanya bantuan PKH, diharapkan dapat membantu masyarakat dengan mengurangi beban masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan dan kesehatan.

Dalam menunjang keberhasilan implementasi PKH perlu memperhatikan beberapa hal, seperti sumber daya. Sumber daya dalam pelaksanaan PKH meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Dinas Sosial Kota Tegal berkoordinasi dengan Unit Pelaksana PKH (UPPKH) yang sebagai pelaksana PKH. Pelaksana PKH yang ada saat ini sebagai pelaksana teknis lapangan hanya berkisar 17 orang dengan mendampingi penerima PKH sebanyak 6.257 KPM. Hal tersebut tentu dapat menjadi faktor penghambat

dalam keberhasilan implementasi PKH karena setiap pendamping memiliki jumlah dampingan yang melebihi jumlah idealnya. Selain sumber daya manusia, penggunaan dana bantuan untuk pendidikan juga masih menjadi sorotan. Hal ini karena dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk keperluan sekolah melainkan sebagian digunakan untuk kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, kepatuhan kelompok sasaran juga diperlukan dalam keberhasilan implemenasi PKH di Kecamatan Tegal Timur. Kepatuhan sasaran merupakan tindakan untuk melaksanakan permintaan orang lain. Dalam hal ini, kelompok sasaran yakni KPM harus mematuhi kebijakan PKH. Tingkat kepatuhan dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu menghadiri Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan oleh pendamping setiap bulannya. Namun, mengingat waktu dan kondisinya tidak mendukung karena pekerjaan sehingga KPM tidak menghadiri P2K2. Selain itu juga sasaran PKH sendiri kurang tertib administrasi sehingga dapat menghambat pelaksana PKH dalam melakukan pemutakhiran data.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana hubungan sumber daya dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal?
2. Bagaimana hubungan kepatuhan kelompok sasaran dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal?
3. Bagaimana hubungan sumber daya dan kepatuhan kelompok sasaran dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui hubungan sumberdaya dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui hubungan kepatuhan kelompok sasaran dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
3. Untuk mengetahui hubungan sumberdaya dan kepatuhan kelompok sasaran dengan

implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Administrasi Publik**

Chandler dan Plano mengemukakan administrasi publik adalah proses untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan sumber daya maupun personel publik untuk diformulasikan, diimplementasikan, serta dikelola keputusan-keputusan yang merupakan hasil dari kebijakan publik (Keban, 2014:3)

Fesler sebagai proses penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijakan untuk kepentingan publik dengan pelaksanaannya oleh birokrasi (*the administration of goverment affairs*) (Keban, 2014:5)

Nicholas Henry (1988) mendefinisikan sebagai suatu kombinasi diantara teori serta praktek dan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah dan mendorong pemerintah agar lebih responsif terkait kebutuhan sosial (Pasolong, 2012:56)

### **2. Kebijakan Publik**

Peterson memandang kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan, melalui pemberian perhatian kepada “siapa

mendapat apa, kapan, serta bagaimana” (Keban, 2014:61)

Thomas Dye mengungkapkan sebagai bentuk pilihan pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan (Subarsono, 2016:2)

Islamy bahwa kebijakan publik merupakan pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari rangkaian tindakan pemerintah dengan orientasi untuk kepentingan publik (Anggara, 2016:501)

### 3. Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn (Keban, 2014:67) terdapat fase-fase kebijakan publik, yaitu:

#### 1) Penetapan agenda kebijakan

Tahap ini sebagai para aktor menentukan masalah publik yang harus diselesaikan. Penentuan masalah ditentukan dari prosedur atau *problem structuring*.

#### 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*)

Tahap ini menguraikan kemungkinan kebijakan dengan menggunakan prosedur atau forecasting untuk mengungkapkan konsekuensi masing-masing dari kemungkinan kebijakan.

#### 3) Adopsi kebijakan (*policy adoption*)

Penentuan pilihan kebijakan dilakukan setelah proses rekomendasi melalui dukungan administrator maupun legislatif.

#### 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Tahap ini, administrator melaksanakan atas kebijakan yang telah dipilih dengan mengerahkan sumber daya maupun melakukan monitoring.

#### 5) Penilaian kebijakan (*policy assesment*)

Tahap ini menilai kesesuaian proses implementasi dengan apa yang telah ditentukan dan proses evaluasi mulai diterapkan.

### 4. Implementasi Kebijakan Publik

Merilee Grindle mengungkapkan implementasi sebagai bentuk kajian atau keterkaitan yang berfungsi untuk memudahkan tujuan kebijakan yang sebagai impact dari kegiatan pemerintah dapat tercapai (Winarno, 2012:149)

Dalam implementasi kebijakan terdapat model-model implementasi kebijakan yang digunakan oleh para ahli. Penulis menggunakan teori dari Merilee S. Grindle (Subarsono, 2016:93) yang mana memiliki 2 faktor sebagai penentuan keberhasilan implementasi yakni isi kebijakan dan konteks kebijakan. Secara rinciannya, diuraikan sebagai berikut:

1) Isi kebijakan, yang meliputi kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, serta sumber daya.

2) Konteks implementasi, yang meliputi kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

## 5. Sumber Daya

Sumber daya digolongkan ke dalam dua bagian yaitu sumber daya manusia serta non manusia (Simamora, 2001:3)

Menurut Sabatier dan Mazmanian (Subarsono, 2012:94) sumber daya yang dimaksud mencakup sumber keuangan yang memadai dan tersedianya teknologi.

Sementara George Edward (Winarno, 2012:184) menyatakan sumber daya yang dimaksud adalah:

- 1) Staff dalam segi jumlah relatif cukup dan memiliki keahlian serta keterampilan dalam melaksanakan kebijakan.
- 2) Informasi yang memadai dalam melaksanakan kebijakan.
- 3) Kewenangan implementor dalam melaksanakan kebijakan.
- 4) Fasilitas yang memadai dalam melaksanakan kebijakan.

## 6. Kepatuhan Kelompok Sasaran

Menurut Taylor (2006:266) sebagaimana dikutip dalam jurnal Astuti (2014) kepatuhan ialah pemenuhan apa yang diminta orang lain, yang diartikan

melakukan apa yang diminta orang lain dengan bentuk suatu tindakan ataupun perbuatan atau dengan kata lain melaksanakan keinginan orang lain, kepatuhan merujuk pada respon perilaku terhadap permintaan pihak lain.

Milgram dalam Wilujeng (2010:23-25) sebagaimana dikutip oleh Astuti (2014) bahwa terdapat tiga hal indikator kepatuhan seseorang, yaitu kepribadian, kepercayaan, dan lingkungan.

Sementara menurut Taylor yang dikutip oleh Astuti (2014) indikator untuk mengukur kepatuhan atau ketaatan seseorang, yaitu informasi, imbalan, keahlian, kekuasaan rujukan, dan otoritas yang sah.

Milgram yang dikutip Astuti (2014) menjelaskan bahwasannya ada tiga indikator untuk mengukur kepatuhan atau ketaatan seseorang yaitu pengawasan, kekuasaan, dan daya pengaruh situasi.

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden dalam penelitian ini sebanyak 95 KPM PKH bidang pendidikan di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner dengan melakukan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi kendall tau, koefisien konkordansi kendall (W), dan koefisien determinasi.

## **F. HASIL PENELITIAN**

### **1. Variabel Hasil Implementasi (Y)**

Dari 95 responden sebanyak 39 responden menyatakan bahwa implementasi PKH kurang baik. Sebanyak 48 orang menyatakan implementasi PKH baik dan 8 orang responden menyatakan implementasi PKH sangat baik. Mayoritas responden memberikan penilaian baik sehingga muncul nilai rata-rata sebesar 2,67 dengan keterangan yaitu implementasi PKH dapat berjalan dengan baik.

### **2. Variabel Sumber Daya (X1)**

Dari 95 responden sebanyak 4 responden menyatakan bahwa sumber daya yang terdapat pada PKH sangat kurang baik. Sebanyak 55 orang menyatakan sumber daya yang terdapat pada PKH kurang baik, 35 orang responden menyatakan sumber daya yang terdapat pada PKH baik, dan 1 orang responden menyatakan sumber daya yang terdapat pada PKH sangat baik. Mayoritas responden memberikan penilaian kurang baik sehingga muncul nilai rata-rata sebesar 2,35 dengan keterangan yaitu sumber daya pada PKH tersedia dengan kurang baik.

### **3. Variabel Kepatuhan Kelompok Sasaran (X2)**

Dari 95 responden sebanyak 45 responden menyatakan bahwa kepatuhan kelompok sasaran kurang baik pada PKH.

Sebanyak 47 orang menyatakan kepatuhan kelompok sasaran baik pada PKH dan 3 orang responden menyatakan kepatuhan kelompok sasaran sangat baik pada PKH. Mayoritas responden memberikan penilaian baik sehingga muncul nilai rata-rata sebesar 2,56 dengan keterangan yaitu kelompok sasaran dapat mematuhi PKH dengan baik.

## **G. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Hubungan antara Sumber Daya (X1) dengan Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan (Y)**

Berdasarkan analisis tabel silang terlihat bahwa kondisi sumber daya yang baik sebagian besar juga mempunyai hasil implementasi yang baik pula. Hal tersebut memiliki arti bahwa perolehan hasil implementasi dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki.

Nilai korelasi antara sumber daya dengan implementasi PKH menghasilkan nilai sebesar 0,445 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai korelasi 0,445 berada diantara 0,40 - 0,599 yang memiliki arti adanya hubungan yang cukup kuat atau sedang antara sumber daya dengan implementasi.

Selanjutnya, dalam penghitungan koefisien determinasi didapatkan nilai Adjusted R Square yang merupakan hasil persentase hubungan sumber daya dengan

implementasi PKH adalah sebesar 38,2%. Hal ini menunjukkan arti bahwa besaran nilai variabel Y yaitu implementasi PKH dapat dijelaskan variabel X1 yaitu sumber daya yang sebesar 38,2%.

## **2. Analisis Hubungan antara Kepatuhan Kelompok Sasaran (X2) dengan Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan (Y)**

Berdasarkan analisis tabel silang terlihat bahwa kondisi kepatuhan kelompok sasaran yang baik juga sebagian besar menghasilkan implementasi yang baik. Hal tersebut memiliki arti bahwa perolehan hasil implementasi dipengaruhi kepatuhan kelompok sasaran yang dimiliki.

Nilai korelasi antara kepatuhan kelompok sasaran dengan implementasi PKH menghasilkan nilai sebesar 0,251 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai korelasi 0,251 berada pada 0,20 - 0,399 yang memiliki makna adanya hubungan kepatuhan kelompok sasaran dengan implementasi rendah. Karena nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,001 dimana tidak lebih dari 0,05, maka menolak H0 dan menerima H2 yang menyatakan terdapatnya hubungan positif dan signifikan diantara kepatuhan kelompok sasaran dengan implementasi PKH.

Selanjutnya, dalam penghitungan koefisien determinasi didapatkan nilai

Adjusted R Square yang merupakan hasil persentase hubungan kepatuhan kelompok sasaran dengan implementasi PKH adalah sebesar 11,8%. Hal ini menunjukkan arti bahwa besarnya nilai variasi variabel implementasi PKH (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kepatuhan kelompok sasaran (X2) yang sebesar 11,8%.

## **3. Analisis Hubungan antara SumberDaya (X1) dan Kepatuhan Kelompok Sasaran (X2) dengan Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan (Y)**

Hubungan sumber daya dan kepatuhan kelompok sasaran dihitung secara bersamaan terhadap implementasi menggunakan SPSS. Hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai Kendall's W yaitu sebesar 0,774 yang memiliki arti bahwa hubungan antara sumberdaya dan kepatuhan kelompok dengan implementasi PKH masuk ke dalam kategori kuat. Tingkat signifikansi dari sumber daya dan kepatuhan kelompok secara bersamaan terhadap implementasi sebesar 0,000 yang menunjukkan arti bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan hipotesis diterima yaitu terdapatnya hubungan yang positif dan signifikan antara sumber daya dan kepatuhan kelompok sasaran secara bersamaan terhadap implementasi PKH.

Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R) menunjukkan angka

koefisien determinasi sebesar 0,376 atau sama dengan 37.6%. Hal ini memiliki makna sumbangan sumber daya dan kepatuhan kelompok sasaran yang diberikan secara bersama-sama terhadap implementasi PKH sebesar 37,6%, sementara 62,4% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Tegal Timur dinilai sudah baik. Hal ini didukung oleh kesesuaian PKH untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengaturan kebijakan PKH dalam pendidikan, kesiapan sasaran target kebijakan yang mana sebagai penerima PKH, tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH, dukungan kerjasama dari Unit Pelaksana PKH dan sekolah, dukungan kerjasama masyarakat, tingkat ekonomi KPM setelah menjadi penerima PKH, ketepatan media penyaluran dana bantuan yang menggunakan kartu kombo, dan pemahaman KPM mengenai kebijakan PKH. Namun masih ada yang perlu diperhatikan lagi agar implementasi berjalan lebih maksimal yaitu pada penentuan peserta PKH dan pemahaman KPM mengenai kebijakan PKH.

2. Sumber daya yang tersedia untuk menunjang implementasi PKH di Kecamatan Tegal Timur kondisinya kurang baik. Hasil pengujian hubungan sumber daya dengan implementasi PKH, menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,445 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini memiliki arti bahwa adanya hubungan yang cukup kuat atau sedang antara sumber daya dengan implementasi atau dengan kata lain hipotesis pertama diterima.

3. Kepatuhan kelompok sasaran yang tersedia untuk menunjang implementasi PKH di Kecamatan Tegal Timur bernilai sudah baik. Hasil pengujian hubungan kepatuhan kelompok sasaran dengan implementasi PKH, menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,251 dengan nilai signifikansi 0,001. Hal ini memiliki makna adanya hubungan kepatuhan kelompok sasaran dengan implementasi rendah atau dengan kata lain hipotesis kedua diterima.

4. Sumber daya dan kepatuhan kelompok sasaran secara bersama-sama memiliki hubungan dengan implementasi PKH. Sumberdaya dan kepatuhan kelompok sasaran secara bersamaan dengan implementasi PKH adalah positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh nilai Kendall's W Test sebesar 0,774 yang menunjukkan bahwa korelasi tergolong

kuat. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya dan kepatuhan kelompok sasaran secara bersamaan mampu mempengaruhi terhadap implementasi PKH atau singkat kata, hipotesis ketiga dapat diterima.

## B. SARAN

Berdasarkan pada penarikan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat memberikan saran yaitu:

1. Pada variabel implementasi PKH, perlu diadakannya survei dan pemutakhiran data ulang dalam menentukan peserta PKH serta meningkatkan keterampilan pendamping agar KPM tidak hanya menggugurkan kewajibannya saja tetapi mengetahui manfaat PKH yang seutuhnya sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan PKH.
2. Pada variabel sumber daya, perlu adanya peningkatan kinerja pendamping dalam meningkatkan kesadaran KPM untuk tertib administrasi serta perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap para KPM dalam penggunaan dana bantuan agar tidak disalahgunakan untuk keperluan yang lain.
3. Pada variabel kepatuhan kelompok sasaran, perlunya pendamping untuk mengedukasi para KPM agar dapat meningkatkan pengetahuan KPM serta membangkitkan kesadaran masyarakat

dalam penyampaian informasi kepada sesama KPM agar informasi dari pendamping PKH dapat tersalurkan dengan baik.

4. Penelitian ini sangat diperlukan penelitian lebih lanjut yaitu dengan menggunakan variabel komunikasi dan disposisi pelaksana program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Astuti, SP. 2014. "Kepatuhan Terhadap Norma Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Keban, Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Simamora, Henry. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik  
(Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*.  
Yogyakarta: CAPS (Center of  
Academic Publishing Service).